

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang aktif melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut di maksudkan untuk memajukan kualitas negara menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, agar dapat bersaing dengan negara yang lain. Tentu untuk membantu melaksanakan pembangunan yang aktif adalah dengan tingginya tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara yang berguna bagi pembiayaan nasional sehingga pajak mempunyai peran berarti dalam menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu pajak menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu negara sehingga setiap orang sebagai masyarakat harus mengetahui setiap permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai asas, jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya serta tata cara pembayaran pajak dan fungsi dari pemungutan pajak itu sendiri .

Karakteristik pokok dari pajak menurut Mardiasmo, 2007 : 200 adalah: pemungutannya harus berdasarkan undang-undang diperlukan perumusan

macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusnya. Menurut lembaga yang memungut, Pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak pusat dan Pajak daerah Mardiasmo, 2008. Pajak Pusat penerimaannya berasal dari : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah Propinsi yang penerimaannya berasal dari: Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program 4 pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber

penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah ILPPD kota Surabaya, 2009.

Pajak keuntungan modal secara langsung akan mempengaruhi investasi, dan mobilitas yang risiko aliran modalnya mengalami kemudahan atau kesulitan yang juga dialami oleh Ventures baru dalam memperoleh modal, dan dengan demikian kekuatan dan potensi pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat, Kennedy dalam quote 2009

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada kota dan kabupaten. Self Assesment System adalah sistem pemungutan dan penghitungan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan seluruh kewajiban pajak terutangnya sendiri. Sedangkan Official Assesment system adalah suatu system pemungutan dan penghitungan besarnya pajak terutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan oleh Fiskus. Sistem yang digunakan untuk pemungutan Pajak Reklame adalah Official Assesment System. Dalam hal ini Wajib Pajak adalah Pengusaha atau biro jasa periklanan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang. Atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Siahaan, 2007: 323 .

Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar Laser Compact Disk (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyaknya permasalahan reklame yang belum terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat izin sampai terjadinya kebocoran di penerimaan pajak reklame, sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah. Sesuai SK Wali Kota Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perizinan reklame, disebutkan beberapa kawasan yang terlarang untuk reklame. Di antaranya, persil-persil milik instansi pemerintahan atau pemkot, taman kota, hutan kota, dan taman sekitar monumen.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan

perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klab malam, bilyard, bowling, rekreasi air, pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas, Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan pembayaran pajak reklame pada salah satu gerai Restoran Coffee Toffee, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul: “**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame Pada Restoran Coffee Toffee Klampis Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya**”.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Reklame Restoran Coffee Toffee yang berdiri di bawah naungan PT. COFFEE TOFFEE.
2. Untuk mengetahui jika pemasangan Reklame Restoran Coffee Toffee sudah memenuhi standart Kriteria yang berlaku didalam perundang – undangan.

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame
2. Bagi Masyarakat yang merupakan wajib pajak Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penulis berharap agar hasil studi lapang ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Reklame.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Agar tidak terjadi topik pembahasan yang meluas, maka penulis membatasi lingkup pembahasan mengenai kepatuhan pembayaran pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah koata Surabaya dalam periode 2012 - 2016 di Restoran Coffee Toffee Surabaya.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan studi lapang memungkinkan mahasiswa memperoleh data yang dapat di pertanggungjawabkan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Observasi

Mengamati secara langsung praktek di lapangan mengenai proses pembayaran pajak Daerah yaitu bagaimana pihak Restoran Coffee Toffee menghitung besar jumlah pajak reklame, meknisme membayar pajak reklame, serta apakah Restoran Coffee Toffee telah menjalankan ketentuan – ketentuan yang berlaku selama proses mendaftarkan , mendirikan dan membayar pajak reklame.

### 2. Dokumentasi

Menerima arsip atau dokumen yang di perlukan, yang di berikan oleh Resto Coffee Toffee terkait denga pembayaran pajak rekame dan dokumen tambahan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Arsip dan dokumen yang di dapat antara lain : Struktur Organisasi, data sejarah kantor, wilayah kerja, mekanisme pengitungan, pembayaran serta ketentuan pembayaran pajak reklame Resto Coffee Toffee Surabaya.



### 3. Wawancara

Mengumpulkan data melalui kegiatan Tanya jawab secara tatap muka dengan perwakilan yang berada di Resto Coffee Toffee dan pihak – pihak yang berada di seksi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dalam memberikan informasi dan penjelasan, sehingga mahasiswa memperoleh informasi langsung dan rinci.